

Judul : Penundaan Legislasi RUU PPRT Dipertanyakan
Tanggal : Jumat, 10 Maret 2023
Surat Kabar : Kompas
Halaman : 8

REGULASI

Penundaan Legislasi RUU PPRT Dipertanyakan

JAKARTA, KOMPAS — Nasib Rancangan Undang-Undang Perlin-dungan Pekerja Rumah Tangga di Dewan Perwakilan Rakyat kembali berada dalam ketidak-pastian menyusul munculnya pernyataan Ketua DPR Puan Maharani, Kamis (9/3/2023) mengenai penundaan proses le-gislasi RUU itu. Para pekerja rumah tangga dan organisasi pendukung menyatakan kece-wa dengan langkah pimpinan DPR.

"Kami menyesalkan sikap Ketua DPR yang tak memihak pada pengesahan UU PPRT yang sudah 19 tahun diperju-angkan para PRT dan masyarakat sipil, dan juga sudah didukung Presiden Joko Widodo pada 18 Januari 2023," ujar Koordinator Jaringan Advokasi Nasional Pekerja Rumah Tangga (JALA PRT), di Jakarta, Kamis (9/3/2023) pe-tang.

Dalam keterangan pers yang beredar di kalangan media, Pu-an menyatakan, RUU Perlin-dungan Pekerja Rumah Tangga (PPRT) belum dapat dibawa ke Rapat Paripurna DPR untuk di-sahkan sebagai RUU inisiatif DPR. Sebab, RUU itu belum dibahas dalam Rapat Badan

Musyawarah (Bamus).

Penundaan proses legislasi RUU PPRT diputuskan dalam Rapat Pimpinan (Rapim) DPR sekitar 1 tahun 6 bulan lalu, yakni 21 Agustus 2021. Puan menegaskan, surat Badan Le-gislasi tentang RUU PPRT su-dah dibahas dalam rapat pim-pinan DPR waktu itu.

Pada rapim itu, pimpinan DPR menyetujui untuk melihat situasi lebih dahulu. "Saat itu dirasa belum tepat diagendakan dalam rapat Bamus dan me-merlukan pendalaman," ung-kap Puan secara tertulis.

Penundaan tersebut dilaku-kan karena RUU PPRT belum diagendakan dalam rapat Ba-mus untuk dijadwalkan dalam rapat paripurna. Adapun sidang paripurna itu untuk menyetujui RUU tersebut sebagai RUU Usul Inisiatif DPR. Sebab, ber-dasarkan mekanisme di DPR, untuk bisa dibawa ke sidang paripurna, RUU PPRT harus lebih dulu dibahas dalam rapat Bamus dan disetujui.

Meski demikian, Puan me-nyatakan, DPR akan memper-timbangkan masukan masyara-kat, dengan memperhatikan situasi yang berkembang saat ini. Ia memastikan DPR akan

mendengar aspirasi rakyat ter-masuk dalam pembentukan le-gislasi.

Konfirmasi

Secara terpisah, Ketua Pa-nitia Kerja PPRT di Baleg DPR, Willy Aditya menyatakan, pi-haknya mendapat laporan ba-hwa dalam Bamus yang berlang-sung 9 Februari 2023, Fraksi Partai Nasdem menegaskan, RUU PPRT untuk segera di-bahas dalam sidang paripurna DPR. Jawaban di dalam Bamus itu masih di meja Ketua DPR selaku pimpinan sidang.

"Kami punya Wakil Ketua DPR, sedang kami konfirmasi apakah benar itu keputusan ra-pim, dan rapim kapan kepu-tusan tersebut itu terjadi. Tentu ini satu hal yang sangat di-sayangkan dengan kondisi se-perti ini," ungkap Willy.

Lita Anggraini memperta-nyakan keputusan Ketua DPR tersebut. Sikap Puan terkait RUU itu dinilai kontra dengan sikap semua pemimpin fraksi dan para wakil Ketua DPR yang menyatakan mendukung, ter-utama setelah pernyataan Pre-siden Joko Widodo.

"Ketua DPR justru memakai argumentasi rapim tahun lalu

yang tak relevan untuk me-nunda pengesahan RUU PPRT. Sudah 19 tahun RUU PPRT terkatung-katung, kok Bu Puan masih tega menggantung ter-sebut," kata Lita.

Karena itu, JALA PRT dan Serikat PRT (SPRT) meminta pada ketua dan pimpinan DPR agar segera menggelar rapim. Harapannya, rapim tersebut mengagendakan pengesahan RUU PPRT sebagai RUU ini-siatif DPR pada masa sidang ini, 14 Maret 2023.

Mereka meminta Ketua DPR jangan lagi mengulur dan ber-kilah yang berujung pada ke-putusan mengorbankan para PRT. Karena itu, Ketua DPR diminta berdialog langsung de-ngan para PRT serta korban kekerasan agar memahami si-tuasi kedaruratan yang diha-dapi para PRT.

Kekecewaan juga diungkap-kan para aktivis yang tergabung dalam Koalisi Sipil UU PPRT. Mereka menilai penundaan itu jadi cara DPR mengulur waktu untuk membuat lelah para PRT. Selanjutnya DPR sibuk dengan tahun politik. Dalam keterang-an pers, Kamis petang kemarin, para PRT mempertanyakan si-kap Ketua DPR. (SON)